

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG  
BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, maka nonienklatur Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
DAN  
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003,, diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- B. Pasal 1 huruf j diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

E. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

F. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Fasilitasi perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan pengembangan budaya politik;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

G. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian dan Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- d. Sub Bagian Keuangan;
- e. Sub Bagian Kepegawaian.

I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, terdiri dari :

- a. Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan; -
- b. Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan;
- c. Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Budaya Politik dan Partisipasi Politik;
- e. Bidang Konflik.

J. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri dari :

- a. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
- b. Seksi Ichologi dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Seksi Bela Negara;
- d. Seksi Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.

(2) Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan, terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Lembaga Perwakilan;
- b. Seksi Fasilitasi Pemilu;
- c. Seksi Komunikasi dan Sosialisasi Politik;

- d. Seksi Konstitusi dan Perundangundangan.
- (3) Bidang Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Seksi Fasilitasi Partai Politik;
  - c. Seksi Fasilitasi Organisasi Keagamaan dan Lembaga Sosial Masyarakat;
  - d. Seksi Fasilitasi Organisasi Kernasyarakatn.
- (4) Bidang Budaya Politik dan Partisipasi Politik, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Etika dan Politik;
  - b. Seksi Fasilitasi Pendidikan Politik;
  - c. Seksi Pengembangan Budaya Politik;
  - d. Seksi Pengembangan Partisipasi Politik.
- (5) Bidang Konflik, terdiri dari :
  - a. Seksi Analisis dan Potensi Konflik Sosial;
  - b. Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Sosial;
  - c. Seksi Konflik Pemerintahan dan Keamanan;
  - d. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- K. Pasal 10 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - (1) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 12 Desember 2006

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**TTD**

**S. H. SARUNDAYANG**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 19 Desember 2006

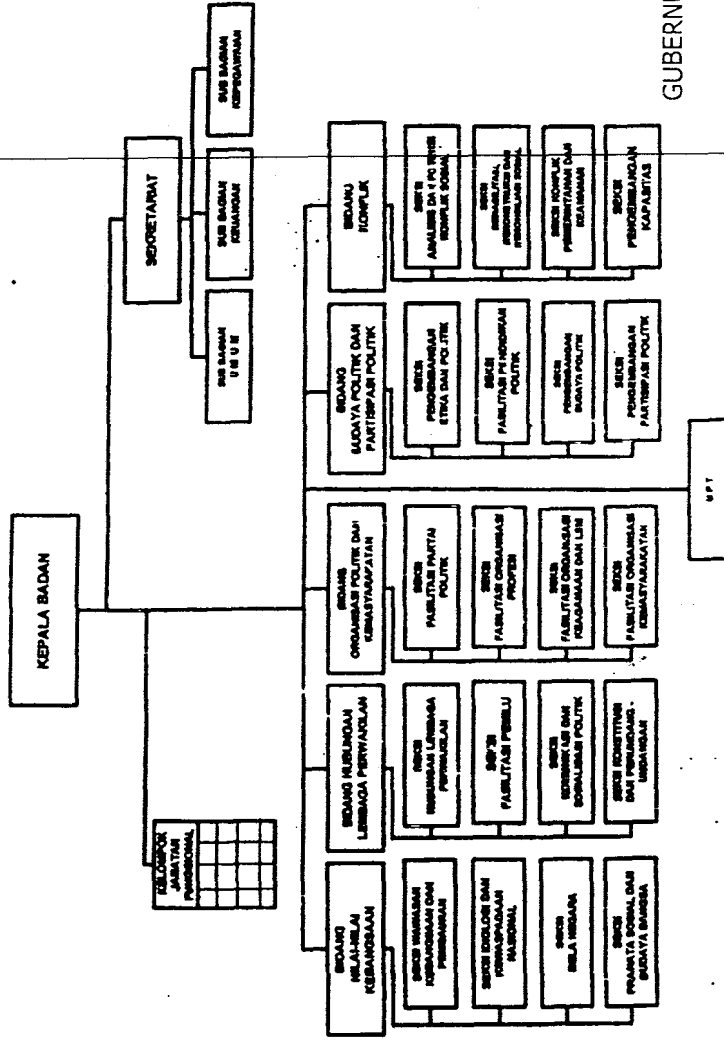
**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**R.J. MAMUAYA**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 18

**BAGAI STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROPINSI SULAWESI UTARA**



TTD

**S. H. SARUNDAJANG**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA**

**I. Penjelasan umum.**

Dengan dibentuknya kelembagaan Direktorat Jenderal Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, maka kelembagaan pusat dapat terakomodasi melalui wadah kelembagaan di Daerah.

Organisasi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara merupakan pengemban tugas pokok dan fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Propinsi Sulawesi Utara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 tahun 2003 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan organisasi saat ini agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dan menjadi bahan pertimbangan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 tersebut.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.**  
Pasal I dan Pasal II : Cukup Jejas.